

MUHAMMADIYAH BAHAS BERBAGAI PERSOALAN DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Minggu, 18-03-2012



Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah baru-baru ini menggelar sebuah Seminar Nasional dengan topik: Kebijakan Penyelenggaraan Haji oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah. Seminar diadakan di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sabtu, 17 Maret 2012.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa Muhammadiyah terpanggil untuk membahas persoalan kebijakan penyelenggaraan haji oleh Pemerintah ini karena munculnya berbagai persoalan di masyarakat, seperti keterbatasan kuota haji yang tersedia, daftar tunggu yang mencapai hampir 10 tahun, masalah DAU, dana talangan haji dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan solusi terhadap rangkaian masalah penyelenggaraan haji tersebut, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menggelar kegiatan ini.

Prof. Dr. Yunahar Ilyas, M.A., Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sesi keynote speech menyampaikan salah satu problem penyelenggaraan haji. Dengan gaya berkelakar, Yunahar mengatakan tentang bagi hasil dari bank yang menyimpan uang pendaftaran jamaah haji yang dikelola Pemerintah, apabila disuruh memilih, maka tentu calon jamaah akan memilih dana itu diberikan untuk mereka, bukan untuk Pemerintah. Persoalannya, saat ini tidak ada opsi untuk memilih. Uang yang telah dibayarkan itu dikelola oleh Pemerintah, calon jamaah tidak mendapat hak apapun dari uang itu.

Seminar Nasional yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini mengundang berbagai kalangan, baik Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Perbankan Syariah, Kelompok Bimbingan Haji, Ormas Islam dan lingkungan internal Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. *amr)